

## Pesan Anggota DPR ke Luhut: Jangan Kurang Senyum

JAKARTA (IM) - Anggota Badan Anggaran DPR Agung Widiantoro berpesan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar lebih sering tersenyum.

Pesan itu disampaikan Agung saat hendak bertanya kepada Luhut di tengah rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6).

"Saya kalau boleh pesan sedikit, Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini, sehingga Bapak kurang senyum gitu," kata Agung, diikuti oleh tawa peserta rapat.

Politikus Partai Golkar itu berujar, mimik wajah Luhut yang tidak tersenyum sempat membuatnya segan untuk mengajukan pertanyaan. "Dari awal tadi saya

sudah, nyali saya ciut, Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak enggak senyum, dari awal Bapak sudah injak gas kencang banget, gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu," ujar Agung.

Sambil sedikit tertawa, Luhut meminta maaf atas wajahnya yang jarang tersenyum. Ia menyebut, hal itu merupakan efek dari lamanya ia berdinast di Komando Prajurit Khusus (Kopassus).

"Pak, mohon maaf dari dulunya memang begitu Pak. Terlalu lama saya di Kopassus, jadi enggak boleh senyum-senyum," ujar Luhut.

Luhut pun mengungkapkan, sikapnya yang jarang tersenyum itu pun sering dipersoalkan oleh sang istri.

"Jadi bukan bini saya saja yang ngekritik, Bapak juga ngekritik, boleh lah pak," kata Luhut. ● me

## Kemenlu Sebut Ada Kemajuan Terkait Pencarian Eril di Sungai Aare

JAKARTA (IM) - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) mengungkapkan ada kemajuan dalam pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Mumtadz Kahn atau akrab dipanggil Eril.

Untuk diketahui, Eril dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, pada Kamis (26/5).

"Terkait dengan progres penemuan Eril di Bern, dapat kami sampaikan memang ada progres," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha dalam press briefing yang diadakan Kemenlu RI, Kamis (9/6).

Namun demikian, Judha belum memberikan informasi detail terkait kemajuan pencarian tersebut. Ia mengatakan, pihak KBRI Bern masih menunggu konfirmasi dan informasi detail mengenai kemajuan pencarian Eril dari pihak kepolisian setempat.

"Dan jika telah mendapat informasi resmi, akan kami sampaikan khusus. Rencana, dari KBRI Bern

akan ada sesi press briefing khusus terkait hal ini," ucap Judha.

Informasinya, hingga Selasa (7/6), pencarian Eril telah mencakup sekitar 30 kilometer wilayah sungai Aare. Pihak kepolisian Bern menilai peningkatan pengunjung yang terjadi di sepanjang Sungai Aare memasuki musim panas akan memberikan dampak positif bagi upaya pencarian.

"Saat cuaca baik, jumlah pengunjung di Sungai Aare cenderung meningkat. Misalnya pada musim panas tahun 2021, jumlah pengunjung yang beraktivitas di Sungai Aare dapat mencapai 18.000 orang dalam satu hari," tulis KBRI Bern dalam keterangan tertulis mereka.

Adapun metode pencarian Eril setiap hari disesuaikan dengan kondisi Sungai Aare yang selalu berubah sesuai perkembangan cuaca. Perubahan metode ini juga selalu memperhatikan aspek keselamatan semua petugas yang terlibat pada misi pencarian. ● han

# Polhukam

FOTO/ANT



## RAKER DPR DENGAN MENTERI PUPR

Menteri PUPR Basuki Basoeki Hadimoeljono (tengah) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6). Pada rapat tersebut membicarakan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023.

## TNI AL Bantah Ada Oknum Perwira Minta Rp5,4 M untuk Bebaskan Kapal Tanker Asing

TNI AL sangat serius untuk memberantas pelanggaran-pelanggaran hukum di laut secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA (IM) - TNI AL bantah berita yang menyebutkan ada oknum perwira meminta uang senilai lebih dari Rp5,4 miliar atau USD375.000 untuk membebaskan kapal tanker bahan bakar asing. Sampai saat ini, tidak ditemukan ada anggota TNI AL melakukan tindakan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksmi TNI Julius Widjojo memintakan pihak yang mengetahui terduga pelaku untuk mengungkap saja nama tersebut. "Sejauh ini tidak ditemu-

nama baik, kami akan lakukan tuntutan sesuai hukum," jelasnya.

Dia pun membenarkan bahwa personel TNI AL menahan kapal Nord Joy karena dicurigai berlabuh di perairan Indonesia tanpa izin karena melanggar hak lintas laut Indonesia.

Ia mengatakan, TNI AL secara serius mendorong percepatan proses hukum ke ke-

jakanan berikan sanksi maksimal sesuai hukum.

"TNI AL sangat serius untuk memberantas pelanggaran-pelanggaran hukum di laut secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Reuters pada Kamis (9/6) melaporkan, adanya dugaan permintaan uang itu diungkap dua sumber. Kedua sumber mengatakan na-

khoda kapal tanker itu dibawa ke pangkalan dan diberitahu oleh perwira Angkatan Laut untuk mengatur pembayaran USD375.000. Kemudian, berpotensi kehilangan penghasilan selama berbulan-bulan jika kasus itu dibawa ke pengadilan.

Nord Joy adalah kapal berbendera Panama, panjangnya 183 meter (200 yard) dan dapat membawa hingga 350.000 barel bahan bakar. ● han

## Mendagri Tito Karnavian Melantik Jeffry Apoly Rahawarin Jadi Deputy BNPP

JAKARTA (IM) - Letnan Jenderal TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin dilantik sebagai Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Jeffry dilantik bersamaan dengan pelantikan Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, di Kantor BNPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Dalam acara pelantikan tersebut Kepala BNPP mengingatkan kembali tugas-tugas pokok yang diemban oleh BNPP. Sebagai badan koordinasi pengelolaan perbatasan, tugas pertama BNPP adalah menegaskan atau menjelaskan batas wilayah Indonesia.

Menteri Tito menyampaikan tugas tersebut tidak mudah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki garis pantai nomor dua terbesar, memiliki tiga time zone dan jumlah penduduk yang besar.

"Dalam konteks ini

saya kira yang paling utama adalah mengklarifikasi dispute (perselisihan) segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di darat, laut, maupun udara. Ada beberapa yang belum tuntas di Kalimantan, kemudian yang berhubungan dengan Timor Leste, dan lain-lain termasuk mungkin ada yang belum kita inventarisir, ini harus diclearkan terutama melalui proses-proses mediasi, dan ini melibatkan banyak instansi termasuk Kementerian Luar Negeri, Badan Geospasial, TNI, Polri, dan lain-lain," katanya.

Memperjelas tanda-tanda batas negara ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap wilayah Indonesia, seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

Tugas BNPP selanjutnya adalah untuk menjaga atau memonitor arus orang dan barang yang keluar dan masuk dari perbatasan negara.

Tito mengakui bahwa pekerjaan ini juga tidak mudah, karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat, laut

dan udara yang seringkali pengeloaannya overlapping dengan negara lain.

Ia menuturkan idealnya setiap orang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia terkontrol. Namun, saat ini Indonesia baru memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh BNPP.

Kepala BNPP meminta jajarannya untuk mengawasi dan mencari solusi adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan-jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, dari human trafficking hingga penyelundupan barang-barang ilegal.

Pembangunan 10 PLBN di perbatasan negara saat ini masih terus dilanjutkan, Menteri Tito berharap jajarannya dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar dapat mempercepat penyelesaian pembangunannya. Selain itu jajaran BNPP juga diminta untuk menyiapkan planning, sistem, management untuk mengelola 10 PLBN tersebut. ● me

## Uang Suap Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif Mengalir ke Musda Demokrat Kaltim

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aliran uang suap Rp3,1 miliar yang diterima Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud. Uang itu diterima Abdul Gafur bersama-sama Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balgis, dan sejumlah pihak lainnya.

Disebutkan, ada Rp1 miliar uang suap itu mengalir pada acara Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Uang dugaan suap itu berasal dari Dirut PT Borneo Putra Mandiri, Ahmad Zuhdi alias Yudi. Uang itu diserahkan Yudi melalui stafnya, Hajrin Zainudin kepada Abdul Gafur lewat Supriadi alias Ucup.

"Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp1 miliar melalui Hajrin Zainudin kepada Supriadi alias Ucup untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Abdul Gafur Mas'ud. Katanya uang itu untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," demikian dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK, Kamis (9/6).

"Di mana, terdakwa Abdul Gafur Mas'ud mengikuti

pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," sambungnya.

Tim jaksa KPK telah membacakan surat dakwaan untuk Abdul Gafur Mas'ud tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Rabu, 8 Juni 2022. Sementara terdakwa Abdul Gafur Mas'ud menjalani persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Jaksa dalam dakwaannya menjelaskan bahwa uang Rp1 miliar itu mulanya diminta oleh orang kepercayaan Abdul Gafur Mas'ud, Asdarussalam kepada Ahmad Zuhdi alias Yudi. Asdarussalam merupakan salah satu orang yang dipercaya Abdul Gafur Mas'ud untuk mengumpulkan serta mengkondisikan uang suap dari para pengusaha.

Asdarussalam disebut pernah menerima uang komitmen fee secara bertahap terkait pembangunan taman atau landscape depan kantor Bupati Penajam Paser Utara senilai total Rp350 juta. Uang itu, disebut tim jaksa, digunakan untuk kepentingan Abdul Gafur Mas'ud.

Asdarussalam juga pernah menerima uang komitmen fee terkait 15 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ahmad

Zuhdi. Dari 15 paket pekerjaan di Penajam Paser Utara itu, Ahmad Zuhdi memberikan uang komitmen fee sebesar Rp500 juta kepada Asdarussalam. Uang itu juga digunakan untuk kepentingan Abdul Gafur Mas'ud.

Terakhir, Asdarussalam diminta oleh Abdul Gafur Mas'ud untuk menagih uang kepada Ahmad Zuhdi di Hotel Aston Samarinda. Ahmad Zuhdi kemudian menyerahkan uang Rp1 miliar lewat stafnya, Hajrin Zainudin kepada Abdul Gafur Mas'ud untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kaltim.

"Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa Abdul Gafur Mas'ud melalui Asdarussalam adalah sebesar Rp1.850.000.000, yang dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Abdul Gafur Mas'ud," beber jaksa.

Diketahui sebelumnya, Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud didakwa menerima suap sebesar Rp5,7 miliar. Abdul Gafur didakwa menerima suap bersama-sama dengan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Balikpapan, Nur Afifah Balgis; Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Mu-liadi. ● han

## LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ROYAL PRIMA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Des 2021	31 Des 2020		31 Des 2021	31 Des 2020
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN</b>	599.963.836.758	260.590.702.914
<b>ASET LANCAR</b>			<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(420.863.176.709)	(167.954.128.119)
Kas dan setara kas	262.687.149.320	41.855.500.267	<b>LABA KOTOR</b>	179.100.660.050	92.636.574.795
Piutang usaha	45.985.243.121	72.243.197.020	Beban administrasi	(84.087.448.275)	(43.163.907.072)
Piutang lain-lain	648.364.505	602.372.571	Beban iklan jasa giro	1.285.480.202	199.053.969
Persediaan	17.929.694.193	11.898.328.494	Beban bunga	-	(357.994.403)
Biaya dibayar di muka dan uang muka	112.090.341.151	10.791.448.158	Penghasilan lain-lain - neto	4.394.305.640	580.180.296
Total Aset Lancar	439.340.792.290	137.390.846.510	<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	100.692.997.617	49.893.907.585
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	(25.196.757.979)	(11.801.112.893)
LIABILITAS			<b>LABA NETO</b>	75.496.239.638	38.092.794.692
Aset tetap - neto	480.662.043.658	375.682.518.916	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Aset pajak tangguhan	2.253.614.178	2.029.493.927	Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Aset tidak lancar lainnya	209.086.395.901	435.200.000.000	Pengukuran kembali	(17.523.892)	113.019.328
Total Aset Tidak Lancar	691.982.053.737	812.912.012.843	Liabilitas imbalan pascakerja	3.855.256	(24.864.252)
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.131.322.846.027</b>	<b>950.302.859.353</b>	Total Penghasilan Komprehensif Lain	(13.668.636)	88.155.076
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>75.482.571.002</b>	<b>38.180.949.768</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			Labo Netu Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:		
Utang usaha	106.773.061.351	30.837.943.467	Pemilik entitas induk	75.433.538.862	38.169.751.561
Utang lain-lain	10.252.383.456	4.385.981.662	Keperentingan nonpengendali	62.700.776	(76.956.869)
Beban akrual	6.380.504.097	1.426.896.592	<b>Neto</b>	<b>75.496.239.638</b>	<b>38.092.794.692</b>
Utang pajak	33.242.231.757	15.673.246.824	<b>Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>		
Pendapatan diterima dimuka	213.103.621	216.603.619	Pemilik entitas induk	75.419.708.022	38.256.177.859
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			Keperentingan nonpengendali	62.862.980	(75.228.091)
Utang pembiayaan konsumen	5.183.110	58.415.487	<b>Neto</b>	<b>75.482.571.002</b>	<b>38.180.949.768</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	156.866.467.392	52.600.089.651	Labo per Saham Dasar/Dilusian Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	22.24	11.25
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	-	5.183.110			
Liabilitas imbalan pascakerja	10.243.700.810	8.345.497.597			
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.243.700.810	8.350.680.707			
<b>Total Liabilitas</b>	<b>167.110.168.202</b>	<b>60.950.770.358</b>			
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham					
Modal dasar - 8.768.320.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.393.432.705 dan 3.393.432.805 saham pada 31 Desember 2021 dan 2020	339.343.490.500	339.343.270.500			
Tambahan modal disetor	461.445.905.817	461.995.592.817			
Saham treasuri	(209.890.000)	-			
Penghasilan komprehensif lain	185.945.667	199.776.507			
Saldo laba	162.375.724.530	86.942.185.668			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	963.141.176.514	888.480.825.492			
Keperentingan nonpengendali	1.071.501.311	871.263.503			
<b>Total Ekuitas</b>	<b>964.212.677.825</b>	<b>889.352.088.995</b>			
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.131.322.846.027</b>	<b>950.302.859.353</b>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN							
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saham treasuri	Penghasilan Komprehensif lain	Saldo Laba	Total	Keperentingan Nonpengendali
Saldo 1 Januari 2020	339.343.260.500	461.995.477.816	-	113.350.209	48.772.434.107	850.224.522.632	946.491.594
Setoran modal dari pelaksanaan waran seri I	10.000	115.001	-	-	125.001	-	125.001
Labo neto tahun berjalan	-	-	-	-	38.169.751.561	38.169.751.561	(76.956.869)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	86.426.298	86.426.298	1.728.778	88.155.076
Saldo 31 Desember 2020	339.343.270.500	461.995.592.817	-	199.776.507	86.942.185.668	888.480.825.492	871.263.503
Setoran modal dari pelaksanaan waran seri I	220.000	1.155.000	-	-	1.375.000	-	1.375.000
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	137.374.828
Perolehan saham treasuri	-	(550.842.000)	(209.890.000)	-	-	(760.732.000)	(760.732.000)
Labo neto tahun berjalan	-	-	-	-	75.433.538.862	75.433.538.862	62.700.776
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(13.830.840)	-	(13.830.840)	162.204
Saldo 31 Desember 2021	339.343.490.500	461.445.905.817	(209.890.000)	185.945.667	162.375.724.530	963.141.176.514	1.071.501.311

1. Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jankamudin, Ardi, Sukimto & Rekan (anggota Audittrust) yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 30 Mei 2022.

10 Juni 2022  
Direksi  
PT ROYAL PRIMA Tbk